

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**RAZAK ASRANDA
1702110036**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RAZAK ASRANDA
NPM : 1702110036

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Mukifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

H. Mulyadi AR, SE, M.Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Pembimbing II

Rusnaldi, SE, M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

RAZAK ASRANDA
NPM : 1702110036

Dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 20 Agustus 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Rusnaldi, SE, M.Si
NIK. 19790615 200507 1 001

Anggota

H. Mulyadi AR, SE, M.Si
NIK. 19620917 200204 1 001

Anggota

Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Razak Asranda

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Razak Asranda
NPM : 1702110036
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Razak Asranda

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya**”. Selanjutnya shalawat beriring salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada ke haribaan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna untuk memenuhi syarat perolehan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang esbesar-besarnya kepada :

1. Bapak Zulfikli Umar, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

2. Bapak H.Mulyadi AR, SE, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Rusnaidi, SE, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas.
5. Serta berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Aamiin Wassalamualaikum Wr.Wb.

Banda Aceh, 10 Agustus 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	8
2.1. Landasan Teoritis	8
2.1.1. Pencegahan <i>Fraud</i> dalam pengelolaan dana desa	8
2.1.1.1. Kecurangan (<i>Fraud</i>)	8
2.1.1.2. Jenis-jenis Kecurangan	10
2.1.1.3. Indikator Pencegahan Kecurangan	11
2.1.2. Kompetensi Aparatur Desa	12
2.1.2.1. Pengertian Kompetensi Aparatur Desa.....	12
2.1.2.2. Manfaat Kompetensi Aparatur Desa.....	13
2.1.2.3. Indikator Kompetensi Aparatur Desa	14
2.1.3. Moralitas.....	16
2.1.3.1. Pengertian Moralitas	16

2.1.3.2. Faktor yang Mempengaruhi Nilai Moralitas.	17
2.1.3.3. Indikator Moralitas	18
2.1.4. Sistem Pengendalian Internal	19
2.1.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	19
2.1.4.2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal	20
2.1.4.3. Indikator Pengendalian Intern.....	21
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	22
2.3. Kerangka Konseptual.....	24
2.3.1. Hubungan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	24
2.3.2. Hubungan Moralitas Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	24
2.3.3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	25
2.4. Hipotesis Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Lokasi dan Objek Penelitian	27
3.2. Jenis Penelitian.....	27
3.3. Populasi dan Sampel	27
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.5. Variabel Penelitian.....	30
3.5.1. Variabel Dependen.....	30
3.5.2. Variabel Independen	30
3.6. Operasional Variabel	30
3.7. Analisis Regresi Linear Berganda	32
3.8. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	32
3.8.1. Pengujian Validitas	32
3.8.2. Pengujian Reliabilitas.....	33
3.9. Pengujian Hipotesis	33
3.9.1. Uji F.....	34

3.9.2. Uji T	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Penelitian	36
4.1.1. Profil Lokasi Penelitian.....	36
4.1.2. Deskriptif Responden Penelitian.....	37
4.2. Deskriptif Data Penelitian.....	38
4.2.1. Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa	38
4.2.2. Kompetensi Aparatur Desa	39
4.2.3. Moralitas.....	41
4.2.4. Sistem Pengendalian Internal	43
4.3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	45
4.4. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas.....	47
4.4.1. Hasil Uji Validitas.....	47
4.4.2. Hasil Uji Realibilitas	48
4.5. Pengujian Hipotesis	49
4.5.1. Uji F.....	50
4.5.2. Uji t.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	53
LAMPIRAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Anggaran Dana Desa Kecamatan Blangpidie, APBN	3
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian	28
Tabel 3.2. Skala Pengukuran.....	29
Tabel 3.3. Definisi dan Operasional Variabel.....	31
Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner	37
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	37
Tabel 4.3. Gambaran Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya	38
Tabel 4.4. Gambaran Kompetensi Aparatur Desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya	40
Tabel 4.5. Gambaran Moralitas di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya	42
Tabel 4.6. Gambaran Sistem Pengendalian Internal di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya	43
Tabel 4.7. Hasil Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda	45
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas.....	48
Tabel 4.10. Koefisiensi Determinasi.....	49
Tabel 4.11. Hasil Uji-F.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Model Penelitian.....	25
---	----

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN
BLANGPIDIE KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Razak Asranda
1702110036

Pembimbing :

1. H.Mulyadi AR, SE, M.Si
2. Rusnaldi, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala Desa yang berjumlah sebanyak 40 orang dari 20 desa atau masing-masing desa mewakili 2 responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu dengan penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian guna menguji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden yang mengisi kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya baik secara simultan maupun parsial.

Kata kunci: Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang desa telah menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang sudah dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan pada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat menunjang pembangunan desa dan pengembangan program desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Di samping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Namun, dalam pengelolaan dana desa tersebut tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, ternyata ada beberapa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di dana desa di berbagai daerah di Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kegiatan korupsi mayoritas dilakukan oleh perangkat desa pada 2020. Sedikitnya ada 330 kasus korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Peningkatan perilaku korupsi yang diperbuat oleh perangkat desa sejak 2018, sedikitnya ada 158 terdakwa yang berasal dari perangkat desa. Angka itu bertambah menjadi 188 satu tahun berselang, jumlah tersebut meningkat relatif signifikan pada 2020 menjadi 330 kasus. ICW mencatat setidaknya 676 kasus korupsi dilakukan perangkat desa sejak 2018 hingga 2020 lalu (Republika, 2021).

Berdasarkan the *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) *fraud* adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. *Fraud* biasanya terjadi jika sistem pengendalian yang ada sangat lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan.

Kajian yang dilakukan KPK di tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan antara lain pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Hal tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang belum memenuhi standar dan rawan manipulasi, potensi *fraud* oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa, dan lain-lain. Hal tersebut telah terjadi di berbagai pemerintahan Kecamatan di

Indonesia termasuk di daerah Provinsi Aceh atau lebih khususnya di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kecamatan Blangpidie merupakan salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Blangpidie terdiri dari 20 desa dan setiap desa dipimpin oleh Geuchik. Setiap desa menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang begitu besar setiap tahunnya. dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Anggaran Dana Desa
Kecamatan Blangpidie, APBN

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
1	2019	14.873.935.000	14.873.935.000	-	100%
2	2020	15.187.235.000	15.187.235.000	-	100%

Sumber : Kecamatan Blangpidie.

Tabel 1.1 menjelaskan besarnya kucuran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Tercatat total dana desa yang telah tersalur di 2019 sebesar Rp. 14.873.935.000, penyaluran tersebut sejalan dengan peningkatan dana desa yang terus meningkat. Pada tahun 2020 dana desa tersalur hingga Rp. 15.187.235.000 , Dengan jumlah anggaran dana desa yang begitu besar setiap tahunnya, perlu adanya antisipasi pencegahan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

Salah satu antisipasi pencegahan terjadinya *fraud* yaitu melalui kompetensi aparatur desa. Kompetensi aparatur desa adalah suatu kemampuan kerja aparatur yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang baik (Sutrisno, 2014:203). Kompetensi aparatur desa dapat ditingkatkan

dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya (Laksmi dan Sujana, 2019).

Kompetensi aparatur desa tidak hanya teridentifikasi dari tingkat pengetahuan dan keahlian mereka dalam menyelesaikan berbagai bentuk tanggung jawabnya, namun juga berkaitan dengan sikap dan karakteristik kepatuhan mereka terhadap aturan hukum. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, aparatur desa perlu memiliki sikap dan karakteristik kepribadian yang baik dalam bekerja seperti dapat mematuhi segala bentuk aturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dana desa, respon terhadap kondisi masyarakat dan kerugian-kerugian keuangan Negara.

Selain kompetensi aparatur desa, antisipasi terjadinya *fraud* di pengelolaan dana desa juga perlu adanya moralitas. Moralitas atau moral merupakan baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang (Junia, 2016). Moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Untuk mencegah kecurangan (*fraud*) di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan dan menanamkan pemikiran tentang moralitas yang tinggi kepada pemerintahan desa.

Menurut Rahimah *et al.*, (2018) individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika

universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Kemudian tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa juga dapat diminimalisir dan dicegah dengan memperhatikan sistem pengendalian internalnya. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Adi *et al.*, 2016).

Semakin kuat sistem pengendalian internal yang terdapat pada pemerintahan desa maka tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah. Namun, jika pengendalian internalnya lemah maka tindakan kecurangan yang akan terjadi semakin besar (Martani dan Zaelani, 2011).

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penelitian masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya .
2. Apakah kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Apakah moralitas secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Apakah sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Untuk mengetahui pengaruh moralitas secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat. Begitu pula hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi khususnya peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

2. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada aparatur desa mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadi referensi untuk menghindari *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

2.1.1.1. Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut, sementara kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan (Yesriani & Rahayu, 2017).

Menurut Karyono (2013:4-5) *fraud* ialah: dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2013:226) definisi *fraud* adalah penyalahgunaan wewenang/pangkat yang terjadi dalam sektor pemerintahan yang dilakukan demi memperoleh keuntungan individu. Contohnya penjualan aset negara secara tidak sah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, pengadaan *kickbacks* dalam sektor pemerintahan, penyuapan, dan “pencurian” dana-dana pemerintah.

Kecurangan atau *Fraud* menurut Fahmi (2014:296) mengandung arti penipuan, kebohongan, kejahatan, penggelapan barang, manipulasi data transaksi, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan mengubah fakta serta menghilangkan barang bukti secara sengaja. Kemudian Fahmi (2014:296) juga menjelaskan *Fraud* secara umum merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan disengaja tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 (dalam Wiyandika dan Lilis (2017) mendefinisikan kecurangan adalah sebagai berikut:

Fraud sebagai perbuatan curang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Sedangkan kecurangan yang lebih khusus menurut Siegel dan Jae (1981) dalam Fahmi (2014:296) kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian dengan cara penyajian yang keliru.

Fraud itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *Fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi (Hardianto 2012:4).

2.1.1.2 Jenis-jenis Kecurangan

Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik dalam kegiatan keuangan, produksi dan kegiatan lainnya yang ada kaitannya dengan aliran uang. Dari bagan *Uniform Occupational Fraud Classification System*, The ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners, 2000*) dalam Wiyandika dan Lilis (2017) yaitu perbuatan:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset misappropriation*)
Kecurangan ini meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan. Hal ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah terdeteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung.
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent statemen*)
Kecurangan ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat instansi pemerintah atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta memunculkan nilai laba yang atraktif, sehingga dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
3. Korupsi (*Corruption*)
Jenis *Fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Menurut Tuanakotta (2007:96) dalam Rajagukguk (2017) menjelaskan ada tiga bentuk kecurangan, antara lain :

1. Penyalahgunaan atas aset adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas.
2. Pernyataan palsu atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan itu.

3. Korupsi penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk keuntungan pribadi.

Delf (2004) dalam Nurhayati dan Indianik (2014) menambahkan satu lagi tipologi *fraud* yaitu kecurangan dengan jaringan teknologi (*cybercrime*). Ini jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain.

2.1.1.3 Indikator Pencegahan Kecurangan

Pencegahan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah (Fahmi, 2014:325). Solusi pencegahan *fraud* menurut Fahmi (2014:326) dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan sistem pengendalian internal,
2. Melakukan seleksi pegawai secara berkualitas,
3. Meningkatkan kehandalan internal audit,
4. Memberi imbalan yang memadai bagi seluruh pegawai,
5. Melakukan rotasi kerja serta mewajibkan pegawai untuk mengambil cuti,
6. Melakukan pembinaan rohani,
7. Memberikan sanksi yang tegas.
8. Menumbuh kembangkan iklim keterbukaan,
9. Adanya suri tauladan yang baik dari manajemen/pimpinan,
10. Adanya kebijakan tertulis mengenai *fair dealing*.

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin, Tunggal (2016:59) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah kecurangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi
 - a) Menetapkan *tone at the top*.
 - b) Menciptakan lingkungan kerja yang positif.
 - c) Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat.
 - d) Pelatihan.
 - e) Konfirmasi.
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan kecurangan (*fraud*).
3. Pengawasan oleh komite audit
 - a) Membangun struktur pengendalian intern yang baik sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan akan terkendali satu sama lainnya.
 - b) Mengefektifkan aktivitas pengendalian review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pemisahan tugas.
 - c) Meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan implementasikan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga dapat mendorong sistem kerja dalam perusahaan akan lebih ber etika dan mengedepankan norma-norma.
 - d) Mengefektifkan fungsi internal audit
Internal auditor dengan menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama untuk melakukan pemeriksaan secara berkala sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan.

2.1.2 Kompetensi Aparatur Desa

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Laksmi dan Sujana (2019) kompetensi SDM adalah kemahiran /keterampilan yang didapati dalam diri manusia untuk menghadapi situasi atau keadaan saat melakukan tanggung jawab pekerjaannya. Kompetensi perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.

Sedangkan menurut Armelia dan Made (2020) menyatakan kompetensi aparat desa adalah kredibilitas yang dimiliki oleh seseorang perangkat desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa. Kemudian Laksmi dan Sujana (2019) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu sebagai berikut:

Kompetensi mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seorang individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan output dan outcome. Didalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, mengikuti pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan keuangan desa dan memahami peraturan serta prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa beserta tujuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2017) kompetensi meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sedangkan Torang (2013:53) menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan (*skill & knowledge*) untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas/ pekerjaan/ tugas.

2.1.2.2 Manfaat Kompetensi Aparatur Desa

Agar organisasi dengan mudah mencapai tujuan, maka diperlukan kompetensi. Semakin banyak kompetensi dipertimbangkan dalam proses perekrutan sumber daya manusia maka semakin baik moralitas (Torang 2013:53).

Kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia menurut Yuniarsih dan Suwatno (2013:22) memainkan peran kritikal dan esensial karena disatu sisi merupakan *human capital* dan *active agent* bagi pengembangan suatu organisasi, dan disisi lain merupakan faktor determinan kapabilitas yang merupakan

sekumpulan keahlian dan keterampilan dalam mengkoordinasi dan mengintegrasikan sumber daya manusia.

Menurut Wibowo (2015:271) kegunaan kompetensi bagi karyawan dan organisasi adalah sebagai berikut:

Kompetensi sangat berguna untuk membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang tinggi. Kompetensi sangat diperlukan dalam berbagai tahapan proses manajemen sumber daya manusia dan juga untuk mengkomunikasikan nilai dan standar organisasi, memperbaiki moralitas, meningkatkan kualitas perekrutan tenaga kerja, mengembangkan sumber daya manusia, menjadi dasar yang kuat untuk pelatihan dan pemberian kompensasi.

2.1.2.3 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Setiap organisasi menginginkan agar memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasi visi dan mencapai tujuan. Sumber daya manusia seperti itu menurut Sutrisno (2014:8) hanya akan diperoleh dari pegawai atau anggota organisasi yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.
- 2) Memiliki pengetahuan (*knowledges*) yang diperlukan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh.
- 3) Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian/keterampilan (*skills*) yang diperlukan.
- 4) Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerja sama dengan orang lain, dapat dipercaya, dan loyal.

Sumber daya manusia yang potensial berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Menurut Spencer dalam Wibowo (2015:111) terdapat lima aspek karakteristik atau komponen-komponen/elemen yang membentuk kompetensi, yaitu: *motives* (motif), *traits* (karakter pribadi/sifat), *self concept*

(konsep diri), *knowledge* (pengetahuan) dan *skills* (keterampilan). Kelima indikator tersebut menurut Spencer dalam Wibowo (2015: 111) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Motives* (motif)
Adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan oleh seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing, dan memilih suatu perilaku tertentu untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan. Motif merupakan aspek psikis yang paling berpengaruh dalam tingkah laku individu.
- 2) *Traits* (karakter pribadi/sifat)
Sifat adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau merespon sesuatu dengan cara tertentu. *Traits* (karakter pribadi) merupakan suatu susunan sistem psikifisik (psikis dan fisik yang berpadu dan saling berinteraksi dalam mengarahkan tingkah laku) yang kompleks dan dinamis yang menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, sehingga akan tampak dalam tingkah lakunya yang unik dan berbeda dengan orang lain. Pegawai dengan *Traits* (karakter pribadi/sifat) yang ramah, patuh terhadap perintah, tenang, mudah bekerjasama, penuh toleransi, dan suka menolong orang lain, empati, memiliki emosi yang stabil serta sering berbagi pengalaman dengan rekan kerja adalah bentuk *Traits* (karakter pribadi/sifat) yang diharapkan dalam lingkungan kerja.
- 3) *Self concept* (Konsep diri)
Adalah sikap dan nilai-nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang. Konsep diri merupakan sebagai perilaku yang dimiliki oleh individu atas dirinya sendiri sebagai suatu makhluk fisik, sosial, spiritual dan moral. Sehingga manusia akan mengenali diri mereka sendiri.
- 4) *Knowledge* (pengetahuan)
Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan (knowledge) dapat dibagi menjadi dua:
 - a) Pertama, *tacit knowledge* yaitu pengetahuan yang berbentuk *know-how*, berdasarkan pengalaman, kemampuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu masalah yang pernah dihadapi dan baru.
 - b) Kedua, *explicit knowledge* yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar (cetak maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan pembelajaran (*reference*) untuk orang lain.
- 5) *Skills* (keterampilan)
Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Adapun beberapa *interpersonal skill* (keterampilan interpersonal), antara lain :
 - a) Keterampilan *listening* (mendengarkan), kemampuan menerima pesan atau mendengarkan. Mendengarkan bukan secara harfiah menggunakan alat pendengaran (telinga), tetapi memiliki arti yang lebih luas dengan penggunaan alat penerimaan pesan lainnya.

- b) Kemampuan memahami dan memperoleh informasi, memahami perintah, memahami pesan, memahami kebutuhan orang lain, menggali lebih banyak informasi dibutuhkan sebagai modal agar dapat berkomunikasi serta menjadi kemampuan utama untuk dapat berhasil dalam setiap pekerjaan.
- c) Kemampuan terhadap kualitas informasi, kemampuan untuk dapat menganalisis informasi dibutuhkan agar dapat bertindak tepat. Mendengarkan dan mendapatkan informasi lebih banyak akan meningkatkan kualitas pesan yang diterima, kelengkapan data, dan kemampuan mengolah informasi,
- d) Kemampuan membangun dan memelihara hubungan, banyak survei membuktikan bahwa orang yang memiliki kemampuan untuk mendengar dengan efektif memiliki hubungan yang lebih baik dengan sesamanya.
- e) Kemampuan menolong orang lain, pada saat seseorang mau mendengarkan dan memberikan perhatian yang tulus serta serius kepada permasalahan yang kita sampaikan, hampir sebagian besar masalah kita telah dapat ditolong.

2.1.3 Moralitas

2.1.3.1 Pengertian Moralitas

Moral berasal dari kata Latin *mores* yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik-buruk yang ditentukan bagi individu dan nilai-nilai sosial budaya, dimana individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan (Ali dan Mohammad, 2012:136).

Moralitas adalah hal mendasar dalam penilaian atas setiap tindakan yang diambil oleh manusia. Moralitas berkaitan dengan orang lain bukan hanya mengenai kepentingan pribadi. Serta moralitas merupakan pemikiran yang objektif dan rasional. Selain itu moralitas merupakan hukum yang universal yang penting (Kusumastuti, 2012).

Sedangkan menurut Junia (2016) moralitas merupakan sikap baik dan buruk yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Budi aningsih dalam Udayani dan Sari (2017) menyatakan bahwa moralitas timbul ketika seseorang melakukan kebaikan atas dasar kesadaran dan kewajiban serta tanggungjawabnya, dan bukan karena ingin memperoleh keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya. Pernyataan ini bisa didefinisikan bahwa moralitas setiap orang merupakan perilaku atau sikap baik, dimana orang tersebut bertindak tanpa pamrih atau tidak meminta balasan.

Sementara moralitas menurut Armelia dan Made (2020) adalah sebagai berikut:

Moralitas adalah nilai-nilai tertentu yang dianggap baik atau buruk, dan dapat membedakan mana yang pantas atau tidak untuk dilakukan. Terjadinya tindak kecurangan akuntansi pada suatu organisasi diakibatkan oleh moralitas yang dimiliki aparat yang ada didalamnya. Setiap individu dalam suatu lembaga pasti memiliki tingkat moralitas yang beranekaragam dan akan mempengaruhi tren kecurangan akuntansi. Maka dari itu, orang yang memiliki kemampuan moral yang baik akan lebih memilih mengikuti aturan dan menghindari kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kemudian menurut Idi, A., & Sahrodi, J. (2017) menjelaskan :

1. Moralitas merupakan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya perbuatan manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu. Moral mengandung muatan nilai dan norma yang bersumber pada hati nurani manusia.
2. Moralitas mencakup dalam tiga unsur yaitu perilaku, kognisi, dan afeksi. Dimensi moralitas berangkat dari ajaran tauhid, penghayatan dan pengalaman Agama Islam terbagi kedalam tiga aspek yaitu *îmân*, *Islâm*, dan *ihsân*.
3. Moralitas dalam pendidikan agama dapat dilihat dari sistem nilai Islami yang hendak dibentuk dalam pribadi anak didik dalam wujud keseluruhannya.

2.1.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Nilai Moral

Nilai moral adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya (Ali dan Mohammad, 2012:146).

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya. Baik yang terdapat

dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya (Ali dan Mohammad, 2012:146).

2.1.3.3 Indikator Moralitas

Perbedaan nilai-nilai moral pada seseorang menurut Darmadi (2020:67) dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, hidup rukun dan toleran terhadap dengan pemeluk agama lainnya.
2. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
3. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan perbedaan yang terjadi pada agama, etnis, suku, pendapat, sikap dan tindakan orang lain.
4. Disiplin adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan aturan.

Sementara menurut Setiawan (2013) sikap moral yang baik yang cenderung berkembang dalam diri seseorang mencakup sebagai berikut:

1. Kata hati (*conscience*).
2. Rasa percaya diri (*self esteem*).
3. Empati (*emphaty*).
4. Cinta kebaikan (*loving the good*).
5. Pengendalian diri (*selfcontrol*).
6. Kerendahan hati (*humility*).

2.1.4. Sistem Pengendalian Internal

2.1.4.1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Adi *et al.*, 2016). Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai (Dadang Suwanda dan Dailibas, 2013:4).

Menurut Wardani dan Ika (2017) menjelaskan sistem pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting di dalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan *fraud* atau kecurangan. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kemudian Rahayu dan Suhayati (2010:221) menjelaskan pengendalian intern secara luas yaitu sebagai proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, manajemen dan personil lain sebuah entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal tentang pencapaian tujuan.

Sistem pengendalian internal menurut Armelia dan Made (2020) beragam kebijakan, praktik, dan prosedur yang dilaksanakan dalam perusahaan dengan tujuan melindungi aset perusahaan, mengukuhkan kecermatan dan keunggulan catatan informasi akuntansi, memajukan ketepatan guna dalam aktivitas institusi, dan menilai keteraturan peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh manajemen.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal menurut AICPA dalam Tunggall (2016:9) adalah rencana organisasi dan semua metode yang dikoordinir dan pengukuran yang diterapkan perusahaan.

Kemudian pengertian sistem pengendalian internal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) dalam Puspitawati dan Sri (2014:192) menjelaskan pengendalian intern sebagai proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain sebuah entitas, dirancang untuk memberikan jaminan yang masuk akal tentang pencapaian tujuan perusahaan.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut AICPA dalam Tunggall (2016:12) tujuan sistem pengendalian internal yang efektif diantaranya:

- a) Keandalan laporan keuangan.
- b) Efektivitas dan efisiensi operasi.
- c) Ketaatan pada aturan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mulyadi (2013:163) menyatakan tujuan sistem pengendalian internal yang efektif diantaranya:

- a) Menjaga keamanan harta perusahaan dan juga catatan organisasi.
- b) Memeriksa ketelitian atas kecermatan dan kebenaran data akuntansi.
- c) Membantu agar tidak ada penyimpangan dari kebijakan manajemen yang ada.

Kemudian Tuanakotta (2013:127) menyatakan tujuan pengendalian internal secara garis besarnya terdiri dari empat kelompok, sebagai berikut:

- a) Strategis, sasaran-sasaran utama (*high-level goals*).
- b) Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan).
- c) Operasi (pengendalian operasional atau *operational control*).
- d) Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.3 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian risiko
- c) Kegiatan pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Fuad, A, (2020). Pengaruh kompetensi aparatur, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan

dana desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Aceh. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur desa, budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa baik secara simultan maupun secara parsial.

Penelitian Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R, (2020). Dengan judul pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Wajak.

Penelitian Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K, (2019). Dengan judul pengaruh kompetensi sdm, moralitas dan sistem Pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : kompetensi sumber daya, moralitas dan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaannya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
----	-------------------------	-------------------	------------------	-----------	-----------

1	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. (Fuad, A, 2020).	Metode kuantitatif.	Kompetensi aparatur desa, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa baik secara simultan maupun secara parsial.	-Variabel independen pengaruh kompetensi aparatur desa,dan sistem pengendalian internal. -Variabel dependen pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.	- Objek penelitian - Populasi dan sampel penelitian. -Variabel independen budaya organisasi
2	Pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di kecamatan wajak. (Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. 2020).	Penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif.	Kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan whistleblowing memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.	- Variabel independen pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal. -Variabel dependen pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.	- Objek penelitian. - Populasi dan sampel penelitian. - Variabel independen whistleblowing.
3	Pengaruh kompetensi sdm, moralitas dan sistem Pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. (Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. 2019).	Metode total atau sensus. analisis regresi linier berganda.	Kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.	-Variabel independen moralitas dan sistem pengendalian internal. -Variabel dependen pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.	- Objek penelitian. -Populasi dan sampel penelitian.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1 Hubungan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, mengikuti pelatihan, mengerti tentang akuntansi, keuangan desa dan memahami peraturan serta prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa berserta tujuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah (Laksmi dan Sujana, 2019).

Berdasarkan penelitian dari Fuad, A, (2020). menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih berpotensi melakukan pencegahan kecurangan supaya tidak merugikan masyarakat.

2.3.2 Hubungan Moralitas Terhadap Pencegahan *Fraud*

Individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi (Rahimah *et al.*, 2018).

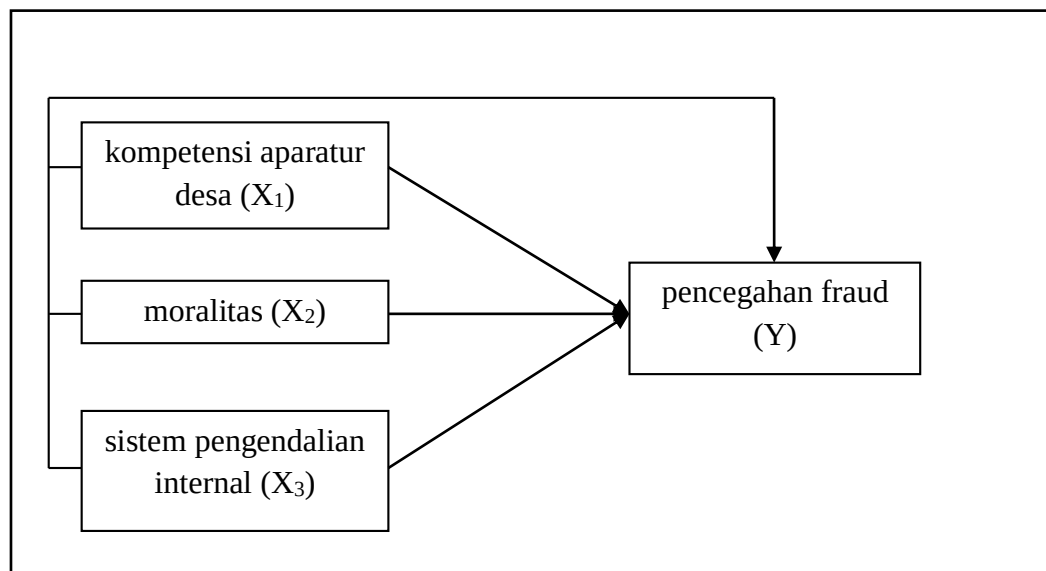
Berdasarkan penelitian dari Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R, (2020) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Semakin baik moralitas seseorang maka tingkat kecurangan yang akan dilakukan semakin berkurang.

2.3.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *fraud*

Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dengan memperhatikan sistem pengendalian internalnya. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Adi *et al.*, 2016).

Berdasarkan penelitian dari Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K, (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pengendalian internal merupakan suatu langkah dalam pencegahan *fraud*.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya maka dapat dikembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Model Penelitian

2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan landasan teoritis maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- H₁: Diduga bahwa variabel kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- H₂: Diduga bahwa variabel kompetensi aparatur desa berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- H₃: Diduga bahwa variabel moralitas berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- H₄: Diduga bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan langsung pada desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Objek penelitian ini adalah mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, moralitas, dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2012).

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah sebanyak 40 responden terdiri dari Kepala Desa dan Sekertaris Desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten

Aceh Barat Daya, yaitu sebanyak dua puluh Desa. Dengan rincian daftar populasi terlampir.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012).. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah aparat desa yang ada di lingkungan setiap desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Kepala Desa dan Sekertaris Desa dengan jumlah 40 responden. Rincian sampel yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Desa	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Jumlah Sampel
1	Alue Manggota	1	1	2
2	Babah Lhung	1	1	2
3	Baharu	1	1	2
4	Cot Jeurat	1	1	2
5	Geulumpang Payong	1	1	2
6	Gudang	1	1	2
7	Guhang	1	1	2
8	Keude Paya	1	1	2
9	Keude Siblah	1	1	2
10	Kuta Bahagia	1	1	2
11	Kuta Tinggi	1	1	2
12	Kuta Tuha	1	1	2
13	Lamkuta	1	1	2
14	Lhung Asan	1	1	2
15	Lhung Tarok	1	1	2
16	Mata Ie	1	1	2
17	Meudang Ara	1	1	2
18	Panton Raya	1	1	2
19	Pasar Blangpidie	1	1	2
20	Seunaloh	1	1	2
	Jumlah	20	20	40

Sumber: Kantor Kecamatan Blangpidie, 2020.

3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Sekaran, 2011:75). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan pembagian kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai tempat jawaban bagi responden (Sekaran, 2011:82). Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan.

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner ke bentuk dan kuantitatif maka digunakan skala ukur yaitu skala Likert. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5. Kategori skala interval menurut Arikunto (2009:66) dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

Sumber : Arikunto,2009

3.5. Variabel Penelitian

3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud*. Variabel pencegahan *fraud* diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

3.5.2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu kompetensi aparatur, moralitas dan sistem pengendalian internal. Variabel kompetensi aparatur, moralitas dan sistem pengendalian internal diukur dengan skala likert skor 1-5. Data yang digunakan berupa data numerik yang diperoleh dari penjumlahan total skor setiap indikator.

3.6. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan empat variabel di antaranya tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kompetensi aparatur desa (X_1) moralitas (X_2) dan sistem pengendalian internal (X_3). Sementara variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y). Karakteristik variabel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Ukuran
1	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Pencegahan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung, (Fahmi, 2014:325).	• Memberikan Hukuman. • Partisipasi. • Menumbuh kembangkan iklim keterbukaan. • Melakukan seleksi dan pembinaan pegawai secara berkualitas. • Meningkatkan sistem pengendalian internal • Memberikan sanksi yang tegas.	Likert	B1–B6
2	Kompetensi Aparatur Desa (X ₁)	Kemampuan seseorang mengelola pekerjaan dan serangkaian aktivitas untuk mencapai target dengan keahlian, keterampilan dan di dukung oleh sikap kerja (Wibowo, 2015:110).	• Latar belakang dan tingkat pendidikan. • Sikap dan perilaku aparatur • Peran kemasyarakatan dan aparatur • Penguasaan pengetahuan dan keahlian • Kemampuan berkarya.	Likert	C1–C5
3	Moralitas (X ₂)	Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan (Ali dan Mohammad, 2012:136).	• Cinta kebaikan • Kerendahan hati. • Pengendalian diri. • Kata hati • Sifat jujur.	Likert	D1–D5
4	Sistem Pengendalian Internal (X ₃)	Proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum, (Adi et al., 2016).	• Lingkungan pengendalian. • Penilaian resiko. • Prosedur pengendalian. • Informasi dan komunikasi. • Pemantauan..	Likert	E1-E5

Sumber : Data Primer diolah peneliti, 2021.

3.7. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk memprediksi pengaruh dan ketergantungan variabel independen kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa maka dilakukan dianalisis regresi linier berganda dengan Rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa

X₁ : Kompetensi aparatur desa

X₂ : Moralitas

X₃ : Sistem pengendalian internal

a : Konstanta

b₁...b₃ : Koefisien regresi berganda

e : Error term.

3.8. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Pengujian Validitas

Uji validitas menjelaskan bahwa instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dapat digunakan atau tidak. Menurut Sugiyono (2012:121) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mencari nilai validitas di sebuah item mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat

tersebut menurut Sugiyono (2012:133) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $r \geq 0,3$ maka item-item tersebut dinyatakan valid.
- b. Jika $r \leq 0,3$ maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid.

3.8.2. Pengujian Reliabilitas

Uji reliabilitas menjelaskan jika instrument yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dalam beberapa kali terhadap pengukuran objek yang menghasilkan data yang sama, maka instrument tersebut dapat dipercaya karena memberikan hasil yang sama. Menurut Sugiyono (2012:122) reliabilitas adalah derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Untuk melihat handal tidaknya suatu alat ukur yang digunakan maka dilakukan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha*. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibutuhkan dengan semua skala variabel yang ada.

3.9. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dengan menggunakan uji F (F-tes) dan secara parsial dengan menggunakan uji T (T-test) pada tingkat keyakinan (*conviden interval*) 95% atau tingkat kesalahan 5% (0.05)

3.9.1. Uji F

Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel independen (X_1 , X_2 dan X_3) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Dengan kriteria pengujian:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka menerima H_a dan menolak H_o

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka menerima H_o dan menolak H_a

Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

H_{o1} = Kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

H_{a1} = Kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

3.9.2. Uji t

Digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel bebas X_1 terhadap Y , X_2 terhadap Y dan X_3 terhadap Y secara parsial. Dengan kriteria pengujian :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka menerima H_a dan menolak H_o

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka menerima H_o dan menolak H_a

Pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

Ho₂ = Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Ha₂ = Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Ho₃ = Moralitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Ha₃ = Moralitas berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Ho₄ = Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Ha₄ = Sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Profil Lokasi Penelitian

Kecamatan Blangpidie adalah salah satu kecamatan dari 9 kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas wilayahnya 473,88 km². Blangpidie merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya. Kecamatan Blangpidie berada pada bagian selatan pesisir Barat Aceh, dan dilewati jalan raya yang menghubungkan Banda Aceh - Medan, yakni sesudah Meulaboh dan sebelum Tapak Tuan. Kecamatan Blangpidie terdapat 20 gampong diantaranya :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Gampong Alue Manggota | 11. Gampong Kuta Tinggi |
| 2. Gampong Babah Lhueng | 12. Gampong Kuta Tuha |
| 3. Gampong Baharu | 13. Gampong Lam Kuta |
| 4. Gampong Cot Jeurat | 14. Gampong Lhung Asan |
| 5. Gampong Geulumpang Payong | 15. Gampong Lhung Tarok |
| 6. Gampong Gudang | 16. Gampong Mata Ie |
| 7. Gampong Guhang | 17. Gampong Meudang Ara |
| 8. Gampong Keude Paya | 18. Gampong Panton Raya |
| 9. Gampong Keude Siblah | 19. Gampong Pasar Blang Pidie |
| 10. Gampong Kuta Bahagia | 20. Gampong Seunaloh |

4.1.2 Deskriptif Responden Penelitian

Kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 40 kuesioner. Rincian kuesioner yang disebar di pemerintahan Desa Kecamatan Blangpidie sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	40	100%
Kuesioner yang kembalikan	40	100%
Kuesioner yang diolah	40	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan rincian jumlah kuesioner yang kembali. Dapat dilihat bahwa dari 40 kuesioner yang disebarkan tingkat pengembalian 100%. Dalam hal ini kuesioner yang disebar ke aparat desa di Kecamatan Blangpidie sepenuhnya kembali dan diolah peneliti.

Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh deskripsi mengenai responden sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Kepala Desa	20	50 %
2	Sekretaris Desa	20	50 %

Sumber : Data Primer diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari responden yang menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan jumlah masing-masing 20 responden dengan persentase masing-masing 50%.

4.2. Deskriptif Data Penelitian

4.2.1. Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Data yang diuji yaitu variabel dependen pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Gambaran Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa
di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa	Sgt Setuju		Setuju		Krg Setuju		Tdk Setuju		Sgt Tdk Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan.	14	35,0	23	57,5	3	7,5	0	0,00	0	0,00	4,28
2.	Masyarakat memberikan saran dan kritik terhadap pengawasan program dana desa yang dilakukan di desa Bapak/Ibu.	8	20,0	30	75,0	1	2,5	1	2,5	0	0,00	4,13
3.	Perangkat desa diberikan kesempatan untuk mengajukan kritik saat pemecahan masalah terkait pengelolaan dana desa.	5	12,5	34	85,0	1	2,5	0	0,00	0	0,00	4,10
4.	Perangkat desa selalu melakukan seleksi terhadap pengangkatan seorang aparatur desa khususnya kepala urusan dalam struktur organisasi desa.	15	37,5	21	52,5	4	10,0	0	0,00	0	0,00	4,10
5.	Perangkat desa selalu meningkatkan aktivitas pemeriksaan internal dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	11	27,5	26	65,0	3	7,5	0	0,00	0	0,00	4,20
6	Kepala desa selalu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas setiap perbuatan kecurangan kepada pelakunya.	14	35,0	23	57,5	3	7,5	0	0,00	0	0,00	4,27
Rata-rata		4,18										

Sumber : Data primer diolah, 2021

Tabel 4.3. menjelaskan gambaran pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan data kuesioner dengan memakai 6 indikator dengan jumlah 40 responden. Jawaban responden sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 4,18 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati nilai 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju) dan menandakan sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang terdata menjawab setuju untuk pertanyaan tentang pencegahan *fraud* tersebut dalam pengelolaan dana desa dan selebihnya memilih pilihan jawaban kurang setuju dan sangat setuju.

Dari 6 indikator yang digunakan untuk menilai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Indikator memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan menjadi indikator terbaik dengan nilai jawaban 4,28 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai skor 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju). Artinya sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan dana desa menjawab setuju jika kepala desa memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan.

4.2.2. Kompetensi Aparatur Desa

Data yang diuji yaitu variabel independen kompetensi aparatur desa dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Gambaran Kompetensi Aparatur Desa

di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kompetensi Aparatur Desa	Sgt Setuju		Setuju		Krg Setuju		Tdk Setuju		Sgt Tdk Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Latar belakang, pengalaman, dan tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tugas/pekerjaan dimana Bapak/ibu ditempatkan.	12	30,0	26	65,0	1	2,5	1	2,5	0	0,00	4,23
2.	Bapak/Ibu memahami kode etik yang bersifat formalistik seperti disiplin yang diukur dari absensi, kinerja diukur dari penyelesaian apa yang diperintah atasan.	10	25,0	28	70,0	2	5,0	0	0,00	0	0,00	4,20
3.	Disaat ada waktu luang perangkat desa melakukan hal-hal yang positif seperti mengevaluasi anggaran yang telah digunakan ketimbang menghabiskan waktu dengan berbicara.	17	42,5	20	50,0	3	7,5	0	0,00	0	0,00	4,35
4.	Bapak/Ibu memahami standarisasi kinerja yaitu acuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan aparatur sudah sesuai dengan pekerjaan.	9	22,5	28	70,0	3	7,5	0	0,00	0	0,00	4,15
5.	Bapak/Ibu mampu mengerjakan tugas yang diberikan selesai tepat waktu (sesuai <i>deadline</i> yang ditentukan).	13	32,5	23	57,5	4	10,0	0	0,00	0	0,00	4,23
Rata-rata		4,232										

Sumber : Data primer diolah, 2021

Tabel 4.4. menjelaskan gambaran kompetensi aparatur desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan data kuesioner dengan memakai 5 indikator dengan jumlah 40 responden. Jawaban responden sudah relatif

baik dengan nilai jawaban rata-rata 4,232 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati nilai 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju) dan menandakan sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang terdata menjawab setuju untuk pertanyaan tentang kompetensi aparatur desa tersebut dalam pengelolaan dana desa dan selebihnya memilih pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Dari 5 indikator yang digunakan untuk kompetensi aparatur desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Indikator disaat ada waktu luang Perangkat desa melakukan hal-hal yang positif seperti mengevaluasi anggaran yang telah digunakan ketimbang menghabiskan waktu dengan berbicara menjadi indikator terbaik dengan nilai jawaban 4,35 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai skor 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju). Artinya sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan dana desa menjawab setuju jika disaat ada waktu luang perangkat desa melakukan hal-hal yang positif seperti mengevaluasi anggaran yang telah digunakan ketimbang menghabiskan waktu dengan berbicara.

4.2.3. Moralitas

Data yang diuji yaitu variabel independen moralitas dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Gambaran Moralitas di Kecamatan Blangpidie

Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Moralitas	Sgt Setuju		Setuju		Krg Setuju		Tdk Setuju		Sgt Tdk Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Bapak/Ibu selalu mengajak semua orang untuk berbuat kebajikan dalam pengelolaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa.	17	42,5	23	57,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,43
2.	Bapak/Ibu selalu patuh, menghormati dan mendengar dengan baik jika ada perkataan-perkataan untuk Perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.	17	42,5	23	57,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,43
3.	Apakah Bapak/Ibu selalu mengendalikan diri terhadap rayuan dan bujukan untuk menerima tambahan penghasilan dari aktivitas yang merugikan orang banyak.	28	70,0	12	30,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,70
4.	Bapak/Ibu merasa bersalah ketika melakukan kebohongan ketika bekerja.	18	45,0	22	55,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,45
5.	Sifat jujur diperlukan dalam bekerja.	10	25,0	30	75,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,25
Rata-rata		4,452										

Sumber : Data primer diolah, 2021

Tabel 4.5. menjelaskan gambaran moralitas di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan data kuesioner dengan memakai 5 indikator dengan jumlah 40 responden. Jawaban responden sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 4,452 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati nilai 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju) dan menandakan sebagian besar dari

jumlah perangkat desa yang terdata menjawab setuju untuk pertanyaan tentang moralitas dan selebihnya memilih alternatif pilihan sangat setuju.

Dari 5 indikator yang digunakan untuk moralitas di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Indikator apakah bapakibu selalu mengendalikan diri terhadap rayuan dan bujukan untuk menerima tambahan penghasilan dari aktivitas yang merugikan orang banyak. menjadi indikator terbaik dengan nilai jawaban 4,70 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai skor 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju). Artinya perangkat desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan dana desa menjawab sangat setuju dan setuju untuk indikator pertanyaan apakah bapak/ibu selalu mengendalikan diri terhadap rayuan dan bujukan untuk menerima tambahan penghasilan dari aktivitas yang merugikan orang banyak.

4.2.4. Sistem Pengendalian Internal

Data yang diuji yaitu variabel independen sistem pengendalian internal dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Gambaran Sistem Pengendalian Internal di Kecamatan Blangpidie
Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Sistem Pengendalian Internal	Sgt Setuju		Setuju		Krg Setuju		Tdk Setuju		Sgt Tdk Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Desa ditempat saya bekerja terdapat struktur organisasi yang jelas.	11	27,5	26	65,0	2	5,0	1	2,5	0	0,00	4,18

Tabel Berlanjut

Lanjutan Tabel 4.6

2.	Perangkat desa selalu dapat mengidentifikasi pihak-pihak (rekanan pengadaan barang dan jasa) yang tidak jujur dan berpotensi melakukan kecurangan.	11	27,5	28	70,0	1	2,5	0	0,00	0	0,00	4,25
3.	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.	17	42,5	19	47,5	4	10,0	0	0,00	0	0,00	4,32
4.	Perangkat Desa selalu dapat menerima informasi pencairan anggaran dengan cepat dan jelas dari berbagai pusat pertanggungjawaban.	12	30,0	26	65,0	2	5,0	0	0,00	0	0,00	4,25
5.	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa.	21	52,5	19	47,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4,52
Rata-rata		4,304										

Sumber : Data primer diolah, 2021

Tabel 4.6. menjelaskan gambaran sistem pengendalian internal di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan data kuesioner dengan memakai 5 indikator dengan jumlah 40 responden. Jawaban responden sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 4,304 unit skala likert. Nilai tersebut mendekati nilai 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju) dan menandakan sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang terdata menjawab setuju untuk pertanyaan tentang sistem pengendalian internal dan selebihnya memilih alternatif pilihan tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju.

Dari 5 indikator yang digunakan tentang sistem pengendalian internal di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Indikator adanya pemeriksaan

yang independen atas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa menjadi indikator terbaik dengan nilai jawaban 4,52 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati nilai skor 5 (skor untuk pilihan jawaban sangat setuju). Artinya sebagian besar dari jumlah perangkat desa yang terdata dan terlibat dalam pengelolaan dana desa menjawab sangat setuju dan setuju untuk pertanyaan adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa.

4.3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil output SPSS regresi linier berganda pengaruh kompetensi aparatur desa (X_1), moralitas (X_2) dan sistem pengendalian internal (X_3) terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y) dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7.
Hasil Penelitian Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,998	5,212		8,200	,093
Kompetensi	,014	,142	,014	2,099	,022
Moralitas	,574	,159	,509	3,600	,001
Spi	,140	,144	,137	2,968	,039

a. Dependent Variable: Pencegahan_Fraud

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.7 diatas maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,998 + 0,014 X_1 + 0,574 X_2 + 0,140 X_3 + e$$

Persamaan di atas menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa sebesar 8,998 menjelaskan jika kompetensi aparatur desa (X_1), moralitas (X_2) dan sistem pengendalian internal (X_3) tidak mengalami perubahan, maka pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y) di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya secara konstan berada pada posisi 8,998 unit skala likert.
2. Koefisien regresi pengaruh kompetensi aparatur desa sebesar 0,014. Nilai tersebut menjelaskan setiap adanya kenaikan satu unit skala likert pada variabel kompetensi aparatur desa maka akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,014 unit skala likert.
3. Koefisien regresi pengaruh moralitas sebesar 0,574. Nilai tersebut menjelaskan setiap terjadinya kenaikan satu unit skala likert pada moralitas maka akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,574 unit skala likert.
4. Koefisien regresi pengaruh sistem pengendalian internal sebesar 0,140. Nilai tersebut menjelaskan setiap terjadinya kenaikan satu unit skala likert pada variabel sistem pengendalian internal maka akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,140 unit skala likert.

4.4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation* menggunakan bantuan *software computer* melalui program *Statistic Package for Social Science* (SPSS) 22. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2012:133) yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria yaitu jika $r \geq 0,3$ maka item-item tersebut dinyatakan valid, dan jika $r \leq 0,3$ maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil uji validitas dapat dilihat Tabel 4.8. Hasil uji validitas di bawah ini.

Tabel 4.8.
Hasil Uji Validitas

Item Pertanyaan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai r	Keterangan
B1	Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa	0,627	0,3	Valid
B2		0,494		
B3		0,465		
B4		0,666		
B5		0,580		
B6		0,606		
C1	Kompetensi aparatur desa	0,640	0,3	Valid
C2		0,596		
C3		0,767		
C4		0,585		
C5		0,786		
D1	Moralitas	0,805	0,3	Valid
D2		0,805		
D3		0,657		
D4		0,822		
D5		0,547		
E1	Sistem pengendalian internal	0,628	0,3	Valid
E2		0,633		
E3		0,867		
E4		0,648		
E5		0,624		

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini semuanya valid, karena mempunyai koefisiensi kolerasi diatas nilai krisis kolerasi *product moment* yaitu sebesar 0,199 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.4.2. Hasil Uji Realibilitas

Untuk menguji kehandalan kuesioner yang digunakan, penelitian ini menggunakan uji reliabilitas. Analisa digunakan untuk menafsirkan kolerasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada. Hasil uji reliabilitas (Tabel 4.5) untuk variabel dependen dan variabel independen menunjukkan hasil yang reliabel. Nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan diatas 0,6 sehingga seluruh variabel yang digunakan dinyatakan handal.

Tabel 4.9.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa	6	0,728	Handal
Kompetensi aparatur desa	5	0,707	Handal
Moralitas	5	0,783	Handal
Sistem pengendalian internal	5	0,713	Handal

Sumber : Data primer diolah, 2021

Hasil pengolahan data memperlihatkan nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel yakni sebesar 0,728 untuk variabel pencegahan *fraud* dalam

pengelolaan dana desa, sebesar 0,707 untuk variabel kompetensi aparatur desa, sebesar 0,783 untuk variabel moralitas dan sebesar 0,713 untuk variabel sistem pengendalian internal.

4.5. Pengujian Hipotesis

Nilai koefisiensi determinasi dapat dilihat dari nilai *R square* dalam penelitian ini pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Koefisiensi Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,538 ^a	,289	,230	1,748

a. Predictors: (Constant), Spi, Kompetensi, Moralitas

Tabel 4.10 menjelaskan hasil output SPSS diperoleh nilai korelasi (R) sebesar sebesar 0,538. Dari nilai tersebut diperoleh nilai R square sebesar 0,289. Koefisien korelasi sebesar $r = 0,538$ menjelaskan terdapat hubungan yang positif antar variabel independen yaitu kompetensi aparatur desa (X_1), moralitas (X_2) dan sistem pengendalian internal (X_3) dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y) di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, hubungan tersebut tergolong kuat dengan keeratan hubungan 0,538 atau 53,8%.

Koefisien determinasi R Square sebesar 0,289 menjelaskan, pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Y) Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,289 atau 28,9% dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kompetensi aparatur desa (X_1), moralitas (X_2) dan sistem pengendalian

internal (X_3). Sementara sisa (nilai residu) dari peran variabel tersebut sebesar 0,230 atau 23,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini seperti variabel pengawasan, etika dan moral pejabat, budaya organisasi serta sanksi-sanksi.

4.5.1. Uji F

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil simultan diperoleh sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji-F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,725	3	14,908	4,877	,006 ^b
	Residual	110,050	36	3,057		
	Total	154,775	39			

a. Dependent Variable: Pencegahan_Fraud

b. Predictors: (Constant), Spi, Kompetensi, Moralitas

Hasil pengolahan data terlihat variabel independen mempunyai nilai F hitung sebesar 4,877. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang telah dijelaskan bahwa jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka menerima H_{a1} dan menolak H_{o1} , sehingga $4,877 > 2,870$. Dengan demikian hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

4.5.2. Uji t

Berdasarkan hasil Uji t (Tabel 4.7), maka pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap variabel kompetensi aparatur desa

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel} (0,05)$. Nilai $t_{kompetensi}$ aparatur desa pada Tabel 4.7 adalah sebesar $2,099 > 1,997$. Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima H_{a2} dan menolak H_{o2} . Artinya kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

2. Pengujian terhadap variabel moralitas

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel} (0,05)$. Nilai $t_{moralitas}$ pada Tabel 4.7 adalah sebesar $3,600 > 1,997$. Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima H_{a3} dan menolak H_{o3} . Artinya moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3. Pengujian terhadap variabel sistem pengendalian internal

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel} (0,05)$. Nilai t_{sistem} pengendalian

internal pada Tabel 4.7 adalah sebesar $2,968 > 1,997$. Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima H_{a4} dan menolak H_{o4} . Artinya sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi aparatur desa, moralitas dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kompetensi aparatur desa secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Moralitas secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana maka semua pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya

2. kompetensi aparaturnya desa, moralitas dan sistem pengendalian internal yang merupakan aspek penting bagi tercegahnya *fraud* dalam pengelolaan dana.
3. Lingkup penelitian terbatas pada desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, diharapkan penelitian selanjutnya menambah objek penelitiannya karena memungkinkan ditemukan hasil dan kesimpulan yang berbeda jika dilakukan pada objek yang berbeda.
4. Penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperluas penelitian dengan menambah variabel penelitian yang diduga mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana.
5. Peneliti diharapkan mengawasi pengisian kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE, (2016). Report to the nations. <https://www.acfe.com>. Diakses pada 20 Mei 2021.
- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis faktor-faktor penentu kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Pemerintah Kota Pekalongan*, 10. Universitas Pekalongan, Pekalongan.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori, (2012). *Psikologi Remaja; Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, (2009). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A, (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61-70. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali.
- Darmadi, H, (2020). *Apa Mengapa Bagaimana Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan: Konsep Dasar dan Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa*. Jakarta: An Image.
- Fahmi, Irham, (2014). *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*. Jakarta: Alumni.
- Fuad, A, (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*. Universitas Muhammadiyah Aceh, Aceh.
- Hardianto, (2012). *Fraud*, Yogyakarta: UGM.
- ICW, (2021). Catatan ICW, Perangkat Desa Mayoritas Terjerat Korupsi di 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qqddeo328/icw-perangkat-desa-mayoritas-terjerat-korupsi-di-2020>. 25 Mei 2021.
- Idi, A., & Sahrodi, J, (2017). Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama. *Jurnal Intizar*, 23(1), 1-16. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R, (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan

Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1). Universitas Kanjuruhan Malang, Malang.

Junia, N., Rasuli, M., & Diyanto, V, (2016). Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, *JOM Fekon*, Vol.3(1). Universitas Riau, Pekanbaru.

Karyono, (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.

Kemendesa, (2015). Perundang-undangan No. 19 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri, (2014). Perundang-undangan No. 113 Tahun 2014 tentang *pedoman pengelolaan keuangan desa*. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (2017). tentang *Arah kebijakan pengembangan kompetensi sdm aparatur*. Jakarta.

Kusumastuti, N. R., & Meiranto, W, (2012). *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K, (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2155-2182. Universitas Udayana, Bali.

Martani, D., Zaelani, F., & Akuntansi, D, (2011). Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah studi kasus di indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 1-27. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Mulyadi, (2013). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurhayati dan Indianik, (2014). Prinsip Know Your Employee Sebagai Upaya Pencegahan kecurangan Pada Perbankan Indonesia. *Journal Epigram*, 11(2). Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta.

- Puspitawati, Lilis, Sri Dewi Anggadini, (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, (2010). *Auditing Konsep dasar dan Pedoman Pemeriksaan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S, (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(12), 139-154. Universitas Pancasila, Jakarta.
- Rajagukguk, Thetty S, (2017). Pengaruh Internal Audit Dan Pencegahan Fraud Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT Perkebunan Nusantara IV). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 1(1). Politeknik Ganesha Medan, Sumatera Utara.
- Sekaran, Uma, (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, E, (2013). Relevansi Tingkat Pendidikan Terhadap Moralitas Suporter Bonek di Surabaya. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 1(2). Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy, (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suwanda, Dadang dan Dailibas, (2013). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Pertama, Ppm.
- Torang, Syamsir, (2013). *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Afabeta.
- Tuanakotta, Theodorus, M, (2013). *Audit Berbasis ISA (international Standard on Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tunggal, Widjaya Amin, (2016). *Memahami Konsep Pengendalian Intern (mencegah, mendeteksi & memberantas kecurangan)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Udayani, A. A. K. F., & Sari, M. M. R, (2017). Pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu pada kecenderungan kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1744-1799. Universitas Udayana, Bali.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I, (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap

Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.

Wibowo, (2015). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wiyandika, S. P. P., & Ardini, L, (2017). Keahlian Auditor Internal Dalam Mendeteksi Fraud Pada PT Inti Dragon Suryatama. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(1). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.

Yesiariani, M., & Rahayu, I, (2017). Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. 21(1), 49-60. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Yuniarsih dan Suwatno, (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta.

Lampiran 01. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Aceh, saya:

Nama : Razak Asranda
NPM : 1702110036
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. **Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.**

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

Hormat saya,

Razak Asranda
1702110036

I. Identitas Responden

Beri tanda (√) atau (X) pada identitas Bapak/Ibu/Saudara(i):

Nama Responden:.....

Usia : ☐ 21-30 tahun ☐ 31-40 tahun

☐ 41-50 tahun ☐ 51-60 tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Jabatan : ☐ Kepala Desa ☐ Sekretaris Desa

Pendidikan

Terakhir : ☐ SMA/SMK ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2

☐ Lain-lain (.....)

II. Persepsi Responden

Untuk pernyataan ini mohon dijawab dengan memberi tanda (√) pada kolom jawaban.

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (TS)	Sangat Setuju (SS)
---------------------------	-------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------

Pencegahan *Fraud* (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan kecurangan.					
2	Masyarakat memberikan saran dan kritik terhadap pengawasan program dana desa yang dilakukan di desa bapak/ibu.					
3	Perangkat desa diberikan kesempatan untuk mengajukan kritik saat pemecahan masalah terkait pengelolaan dana desa.					
4	Perangkat desa selalu melakukan seleksi terhadap pengangkatan seorang aparatur desa khususnya kepala urusan dalam struktur organisasi desa.					
5	Perangkat desa selalu meningkatkan aktivitas pemeriksaan internal dengan melibatkan partisipasi masyarakat.					
6	Kepala desa selalu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas setiap perbuatan kecurangan kepada pelakunya.					

Kompetensi Aparatur Desa (X₁)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Latar belakang, pengalaman, dan tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tugas/pekerjaan dimana Bapak/ibu ditempatkan.					
2	Bapak/Ibu memahami kode etik yang bersifat formalistik seperti disiplin yang diukur dari absensi, kinerja diukur dari penyelesaian apa yang diperintah atasan.					
3	Disaat ada waktu luang perangkat desa melakukan hal-hal yang positif seperti mengevaluasi anggaran yang telah digunakan ketimbang menghabiskan waktu dengan berbicara.					
4	Bapak/Ibu memahami standarisasi kinerja yaitu acuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas/pekerjaan aparatur sudah sesuai dengan pekerjaan.					
5	Bapak/Ibu mampu mengerjakan tugas yang diberikan selesai tepat waktu (sesuai <i>deadline</i> yang ditentukan).					

Moralitas (X₂)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Bapak/Ibu selalu mengajak semua orang untuk berbuat kebajikan dalam pengelolaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa.					
2	Bapak/Ibu selalu patuh, menghormati dan mendengar dengan baik jika ada perkataan-perkataan untuk Perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.					
3	Apakah Bapak/Ibu selalu mengendalikan diri terhadap rayuan dan bujukan untuk menerima tambahan penghasilan dari aktivitas yang merugikan orang banyak.					
4	Bapak/Ibu merasa bersalah ketika melakukan kebohongan ketika bekerja.					
5	Sifat jujur diperlukan dalam bekerja.					

Sistem pengendalian Internal (X₃)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Desa ditempat saya bekerja terdapat struktur organisasi yang jelas.					
2	Perangkat desa selalu dapat mengidentifikasi pihak-pihak (rekanan pengadaan barang dan jasa) yang tidak jujur dan berpotensi melakukan kecurangan.					
3	Informasi diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan baik.					
4	Perangkat desa selalu dapat menerima informasi pencairan anggaran dengan cepat dan jelas dari berbagai pusat pertanggungjawaban.					
5	Adanya pemeriksaan yang independen atas pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan dana desa.					

Terima kasih kepada bapak/ibu yang telah bersedia mengisi kuesioner penelitian dengan judul pengaruh kompetensi aparat desa, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Hormat saya

Razak Asranda
1702110036

Lampiran 02. Tabulasi Data Hasil Kuesioner

Pencegahan *Fraud* (Y)

NO RESPONDEN	PENCEGAHAN FRAUD (Y)						TOTAL Y
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
1	4	5	4	3	5	5	26
2	5	4	5	4	4	4	26
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	4	4	5	4	27
6	5	5	4	5	5	5	29
7	4	5	4	5	5	4	27
8	5	4	5	5	5	4	28
9	5	4	4	5	4	4	26
10	4	4	4	4	4	5	25
11	4	4	4	4	4	3	23
12	4	4	4	5	4	5	26
13	4	4	4	5	5	5	27
14	4	4	4	3	5	3	23
15	4	4	4	5	5	4	26
16	5	4	4	4	4	5	26
17	5	4	5	5	4	4	27
18	4	4	4	4	4	4	24
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	4	5	25
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	3	4	4	23
23	3	4	4	3	4	3	21
24	5	5	4	5	4	5	28
25	5	4	4	3	4	4	24
26	5	4	4	3	4	4	24
27	3	4	3	4	4	4	22
28	4	4	4	4	5	5	26
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	5	4	4	5	5	27
31	5	5	4	3	4	4	25
32	4	3	4	3	4	4	22
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	5	4	5	26

35	5	5	5	5	5	5	30
36	3	4	4	4	3	4	22
37	5	4	4	5	3	4	25
38	5	2	5	4	4	5	25
39	4	4	4	4	4	5	25
40	4	4	4	4	3	4	23

Kompetensi Aparatur Desa (X₁)

NO RESPONDEN	KOMPETENSI APARATUR DESA (X ₁)					TOTAL X ₁
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	5	3	5	21
3	5	5	5	4	5	24
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	5	3	4	20
6	2	5	4	4	4	19
7	5	5	5	5	5	25
8	5	4	3	4	3	19
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	5	4	5	4	4	22
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	5	5	5	23
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	5	5	4	22
16	4	4	4	4	4	20
17	4	5	5	4	4	22
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	4	4	20
21	4	3	4	3	4	18
22	4	4	5	4	4	21
23	5	4	5	4	4	22
24	4	4	4	4	5	21
25	3	3	4	5	4	19
26	4	5	4	4	3	20
27	5	5	4	4	5	23
28	5	5	5	5	5	25

29	5	5	5	4	4	23
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	4	20
32	5	4	4	5	5	23
33	5	4	5	5	5	24
34	5	5	5	5	5	25
35	4	5	5	5	5	24
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	5	4	5	22
38	5	4	5	4	5	23
39	4	4	3	4	3	18
40	4	4	3	4	3	18

Moralitas (X₂)

NO RESPONDEN	MORALITAS (X ₂)					TOTAL X ₂
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	4	4	23
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	5	4	4	5	5	23
6	5	4	5	5	4	23
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	4	24
9	5	5	5	5	4	24
10	4	4	5	4	4	21
11	5	5	5	4	4	23
12	4	4	5	4	4	21
13	5	5	5	5	4	24
14	4	4	5	5	5	23
15	4	4	5	5	5	23
16	4	5	5	4	4	22
17	5	5	5	5	5	25
18	4	4	4	4	4	20
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	5	4	4	21
21	4	4	5	4	4	21
22	4	4	5	4	4	21

23	4	4	4	4	5	21
24	5	5	5	5	5	25
25	5	5	5	5	4	24
26	5	5	5	5	4	24
27	4	4	4	4	4	20
28	4	5	5	5	5	24
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	5	5	5	5	4	24
32	4	4	5	4	4	21
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	5	5	4	22
35	5	5	5	5	5	25
36	4	4	4	4	4	20
37	5	4	4	5	4	22
38	5	5	5	4	4	23
39	4	4	5	4	4	21
40	4	5	5	4	4	22

Sistem Pengendalian Internal (X3)

NO RESPONDE N	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X3)					TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	5	5	5	5	24
2	5	4	3	4	4	20
3	3	4	4	4	4	19
4	4	4	4	4	4	20
5	5	4	5	4	5	23
6	5	5	5	5	5	25
7	4	4	4	4	4	20
8	2	5	4	4	5	20
9	4	4	4	4	5	21
10	4	4	3	4	4	19
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	5	5	5	23
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	5	5	4	22

15	4	4	4	4	5	21
16	4	5	5	4	4	22
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	4	4	4	4	5	21
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	4	4	23
22	3	4	3	4	4	18
23	4	4	4	4	4	20
24	5	4	4	5	4	22
25	4	4	4	4	4	20
26	5	5	5	4	5	24
27	5	4	5	4	5	23
28	5	4	5	5	5	24
29	5	5	5	5	5	25
30	4	5	4	5	4	22
31	4	4	5	4	5	22
32	4	4	4	4	5	21
33	4	5	4	4	5	22
34	4	4	5	4	5	22
35	4	4	5	5	5	23
36	4	4	5	5	5	23
37	4	4	4	3	5	20
38	5	5	5	4	5	24
39	4	3	3	3	4	17
40	4	4	4	5	4	21

Lampiran 03. Hasil deskriptif data penelitian

Pencegahan *Fraud* (Y)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	40	3	5	4,28	,599
Y.2	40	2	5	4,13	,563
Y.3	40	3	5	4,10	,379
Y.4	40	3	5	4,10	,709
Y.5	40	3	5	4,20	,564
Y.6	40	3	5	4,27	,599
Valid N (listwise)	40				
Rata-rata				4,18	

Frequency Table

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	7,5	7,5	7,5
S	23	57,5	57,5	65,0
SS	14	35,0	35,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
KS	1	2,5	2,5	5,0
S	30	75,0	75,0	80,0
SS	8	20,0	20,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	2,5	2,5	2,5
S	34	85,0	85,0	87,5
SS	5	12,5	12,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	8	20,0	20,0	20,0
S	20	50,0	50,0	70,0
SS	12	30,0	30,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Y.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	7,5	7,5	7,5
S	26	65,0	65,0	72,5
SS	11	27,5	27,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Y.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	7,5	7,5	7,5
S	23	57,5	57,5	65,0
SS	14	35,0	35,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Kompetensi Aparatur Desa (X₁)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	40	2	5	4,23	,620
X1.2	40	3	5	4,20	,516
X1.3	40	3	5	4,35	,622
X1.4	40	3	5	4,15	,533
X1.5	40	3	5	4,23	,620
Valid N (listwise)	40				
Rata-rata				4,232	

Frequency Table

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
KS	1	2,5	2,5	5,0
S	26	65,0	65,0	70,0
SS	12	30,0	30,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	5,0	5,0	5,0
S	28	70,0	70,0	75,0
SS	10	25,0	25,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	7,5	7,5	7,5
S	20	50,0	50,0	57,5
SS	17	42,5	42,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	3	7,5	7,5	7,5
S	28	70,0	70,0	77,5
SS	9	22,5	22,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	4	10,0	10,0	10,0
S	23	57,5	57,5	67,5
SS	13	32,5	32,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Moralitas (X₂)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	40	4	5	4,43	,501
X2.2	40	4	5	4,43	,501
X2.3	40	4	5	4,70	,464
X2.4	40	4	5	4,45	,504
X2.5	40	4	5	4,25	,439

Valid N (listwise)	40				
Rata-rata				4,452	

Frequency Table

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	23	57,5	57,5	57,5
SS	17	42,5	42,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	23	57,5	57,5	57,5
SS	17	42,5	42,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	12	30,0	30,0	30,0
SS	28	70,0	70,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	22	55,0	55,0	55,0
SS	18	45,0	45,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	30	75,0	75,0	75,0
SS	10	25,0	25,0	100,0

Total	40	100,0	100,0
-------	----	-------	-------

Sistem Pengendalian Internal (X₃)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	40	2	5	4,18	,636
X3.2	40	3	5	4,25	,494
X3.3	40	3	5	4,32	,656
X3.4	40	3	5	4,25	,543
X3.5	40	4	5	4,52	,506
Valid N (listwise)	40				
Rata-rata				4,304	

Frequency Table

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	2,5	2,5	2,5
KS	2	5,0	5,0	7,5
S	26	65,0	65,0	72,5
SS	11	27,5	27,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	1	2,5	2,5	2,5
S	28	70,0	70,0	72,5
SS	11	27,5	27,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	4	10,0	10,0	10,0
S	19	47,5	47,5	57,5
SS	17	42,5	42,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid KS	2	5,0	5,0	5,0
S	26	65,0	65,0	70,0
SS	12	30,0	30,0	100,0
Total	40	100,0	100,0	

X3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid S	19	47,5	47,5	47,5
SS	21	52,5	52,5	100,0
Total	40	100,0	100,0	

Lampiran 04. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,538 ^a	,289	,230	1,748

a. Predictors: (Constant), Spi, Kompetensi, Moralitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,725	3	14,908	4,877	,006 ^b
	Residual	110,050	36	3,057		
	Total	154,775	39			

a. Dependent Variable: Pencegahan_Fraud

b. Predictors: (Constant), Spi, Kompetensi, Moralitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,998	5,212		8,200	,093
	Kompetensi	,014	,142	,014	2,099	,922
	Moralitas	,574	,159	,509	3,600	,001
	Spi	,140	,144	,137	2,968	,339

a. Dependent Variable: Pencegahan_Fraud

Lampiran 05. Hasil uji validitas

Pencegahan *Fraud*

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Pencegahan_Fraud
Y.1	Pearson Correlation	1	,124	,554*	,236	,137	,213	,627**
	Sig. (2-tailed)		,447	,000	,143	,400	,187	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.2	Pearson Correlation	,124	1	-,180	,161	,404*	,124	,494**
	Sig. (2-tailed)	,447		,266	,322	,010	,447	,001
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.3	Pearson Correlation	,554*	-,180	1	,248	,144	,102	,465**
	Sig. (2-tailed)	,000	,266		,123	,375	,532	,002
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.4	Pearson Correlation	,236	,161	,248	1	,141	,356*	,666**
	Sig. (2-tailed)	,143	,322	,123		,385	,024	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.5	Pearson Correlation	,137	,404*	,144	,141	1	,213	,580**
	Sig. (2-tailed)	,400	,010	,375	,385		,188	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.6	Pearson Correlation	,213	,124	,102	,356*	,213	1	,606**
	Sig. (2-tailed)	,187	,447	,532	,024	,188		,000
	N	40	40	40	40	40	40	40

Pencegahan_Fraud	Pearson Correlation	,627*	,494*	,465*	,666*	,580*	,606*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,002	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Kompetensi aparatur desa

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Kompetensi
X1.1	Pearson Correlation	1	,256	,323*	,206	,332*	,640**
	Sig. (2-tailed)		,110	,042	,203	,036	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X1.2	Pearson Correlation	,256	1	,335*	,261	,256	,596**
	Sig. (2-tailed)	,110		,035	,104	,110	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X1.3	Pearson Correlation	,323*	,335*	1	,224	,655**	,767**
	Sig. (2-tailed)	,042	,035		,165	,000	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X1.4	Pearson Correlation	,206	,261	,224	1	,361*	,585**
	Sig. (2-tailed)	,203	,104	,165		,022	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X1.5	Pearson Correlation	,332*	,256	,655**	,361*	1	,786**
	Sig. (2-tailed)	,036	,110	,000	,022		,000
	N	40	40	40	40	40	40
Kompetensi	Pearson Correlation	,640**	,596**	,767**	,585**	,786**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Moralitas

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Moralitas
X2.1	Pearson	1	,693**	,342*	,646**	,204	,805**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)		,000	,031	,000	,206	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X2.2	Pearson	,693*	1	,563**	,442**	,204	,805**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,004	,206	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X2.3	Pearson	,342*	,563**	1	,373*	,126	,657**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,031	,000		,018	,439	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X2.4	Pearson	,646*	,442**	,373*	1	,522**	,822**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,018		,001	,000
	N	40	40	40	40	40	40
X2.5	Pearson	,204	,204	,126	,522**	1	,547**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,206	,206	,439	,001		,000
	N	40	40	40	40	40	40
Moralitas	Pearson	,805*	,805**	,657**	,822**	,547**	1
s	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sistem pengendalian internal

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Spi
X3.1 Pearson Correlation	1	,184	,413**	,241	,185	,628**
Sig. (2-tailed)		,256	,008	,134	,252	,000
N	40	40	40	40	40	40
X3.2 Pearson Correlation	,184	1	,455**	,335*	,282	,633**
Sig. (2-tailed)	,256		,003	,035	,077	,000
N	40	40	40	40	40	40
X3.3 Pearson Correlation	,413**	,455**	1	,486**	,555**	,867**
Sig. (2-tailed)	,008	,003		,001	,000	,000
N	40	40	40	40	40	40
X3.4 Pearson Correlation	,241	,335*	,486**	1	,163	,648**
Sig. (2-tailed)	,134	,035	,001		,314	,000
N	40	40	40	40	40	40
X3.5 Pearson Correlation	,185	,282	,555**	,163	1	,624**
Sig. (2-tailed)	,252	,077	,000	,314		,000
N	40	40	40	40	40	40
Spi Pearson Correlation	,628**	,633**	,867**	,648**	,624**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
N	40	40	40	40	40	40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 06. Hasil uji realibilitas

Pencegahan *Fraud*

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,728	6

Kompetensi Aparatur Desa

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,707	5

Moralitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,783	5

Sistem Pengendalian Internal

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,713	5